



Paralegal Justice Award

2024

Non Litigation Peacemaker
Anubhawa Sasana Jagaddhita



Paralegal Justice Award

Akses Keadilan Untuk Semua



UUD 1945

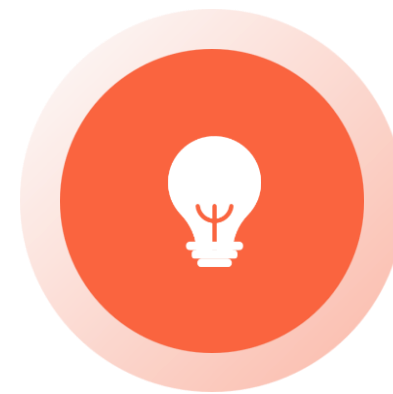
Pasal 27 (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”



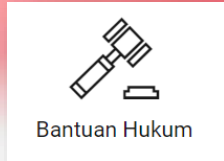
RPJMN 2020 - 2024

Menggalakkan negara berdasarkan hukum dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.



SDG's Goal

Menciptakan kesadaran hukum masyarakat



Data Aplikasi SID Bankum 3 tahun terakhir **12.000 perkara litigasi** dengan dominasi perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Dengan rata-rata perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di Masyarakat.

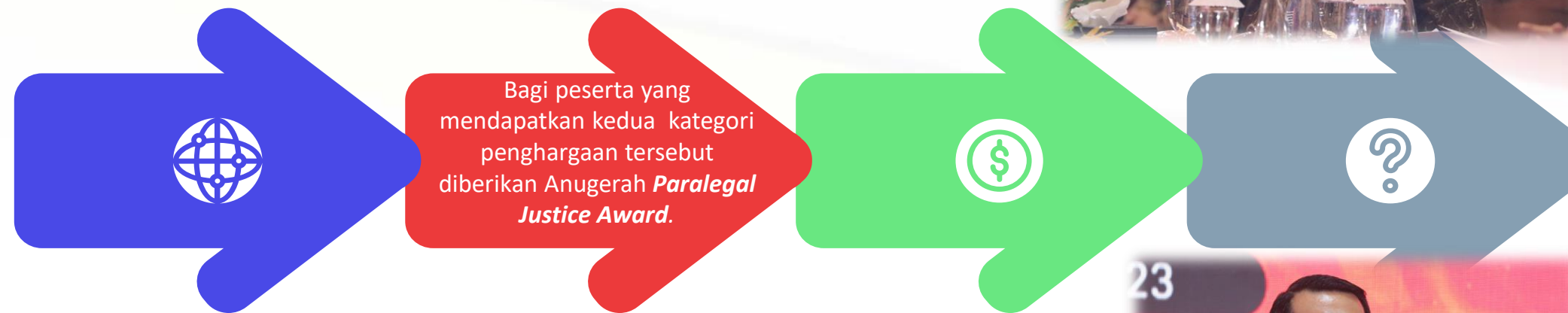
Setiap tahun di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selalu mengalami Over Capacity. Total penghuni di Lapas 228.204 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan Kapasitas 128.656

Gambaran kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung di Pengadilan Tingkat Pertama (PN, PA, PM, PTUN) terdapat beban perkara tahun 2022 sebanyak 3.559.665 perkara

Non Litigation Peacemaker

Penghargaan *Non Litigation Peacemaker* diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah melakukan penyelesaian konflik di wilayahnya secara damai

“ Peran Kepala Desa/Lurah sebagai *Non Litigation Peacemaker* merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya”



Anubhawa Sasana Jagaddhita

Anubhawa Sasana Jagaddhita diberikan kepada Desa/Kelurahan yang telah mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja



“ Mahkamah Agung menyambut baik pelatihan *Paralegal Justice Academy* ini sebagai bentuk nyata kepedulian dan perhatian kami agar setiap konflik yang timbul di masyarakat dapat diupayakan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu tanpa memasuki ranah litigasi”



KRITERIA PESERTA

1. *Non Litigation Peacemaker*

- a. Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
- b. Kepala Desa/Lurah yang memiliki integritas dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa/Lurah serta menciptakan kemudahan akses keadilan di wilayahnya.

2. *Anubhawa Sasana Jagaddhita*

Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.

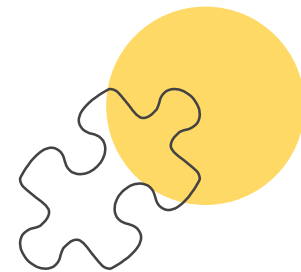
3. *Paralegal Justice Award*

- a. Kepala Desa/Lurah yang memenuhi kriteria sebagai *Non Litigation Peacemaker*;
- b. Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai *Anubhawa Sasana Jagaddhita*; dan
- c. Lulus *Paralegal Academy*.





Syarat Administrasi



SK

Surat Keputusan sebagai Kepala Desa/Lurah yang masih berlaku



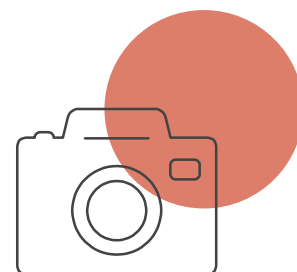
KTP

Kartu Tanda Penduduk dipindai dan diunggah pada link pendaftaran



DRH

Daftar Riwayat Hidup terbaru dengan detail riwayat pekerjaan, pengalaman, pendidikan (berkaitan penyelesaian konflik)



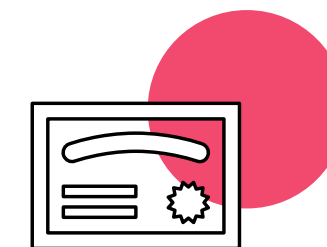
Pas Foto

Dimensi 4x6 dengan latar belakang merah menggunakan PDH putih lengkap dengan atributnya



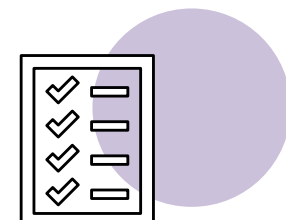
Surat Perintah

Surat Perintah mengikuti Paralegal Justice Award 2024 yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



Sertifikat Paralegal

Apabila pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Paralegal dan memperoleh pengakuan kompetensi oleh Kementerian Hukum dan HAM



Kelengkapan portofolio

- Bagi peserta yang sudah mengikuti PJA 2023, dapat dipertimbangkan untuk menjadi peserta PJA 2024 apabila:
1. Telah mendaftar namun tidak lulus tahapan audisi
 2. Telah mendapat ASJ, namun bukan NLP

Ketentuan Khusus

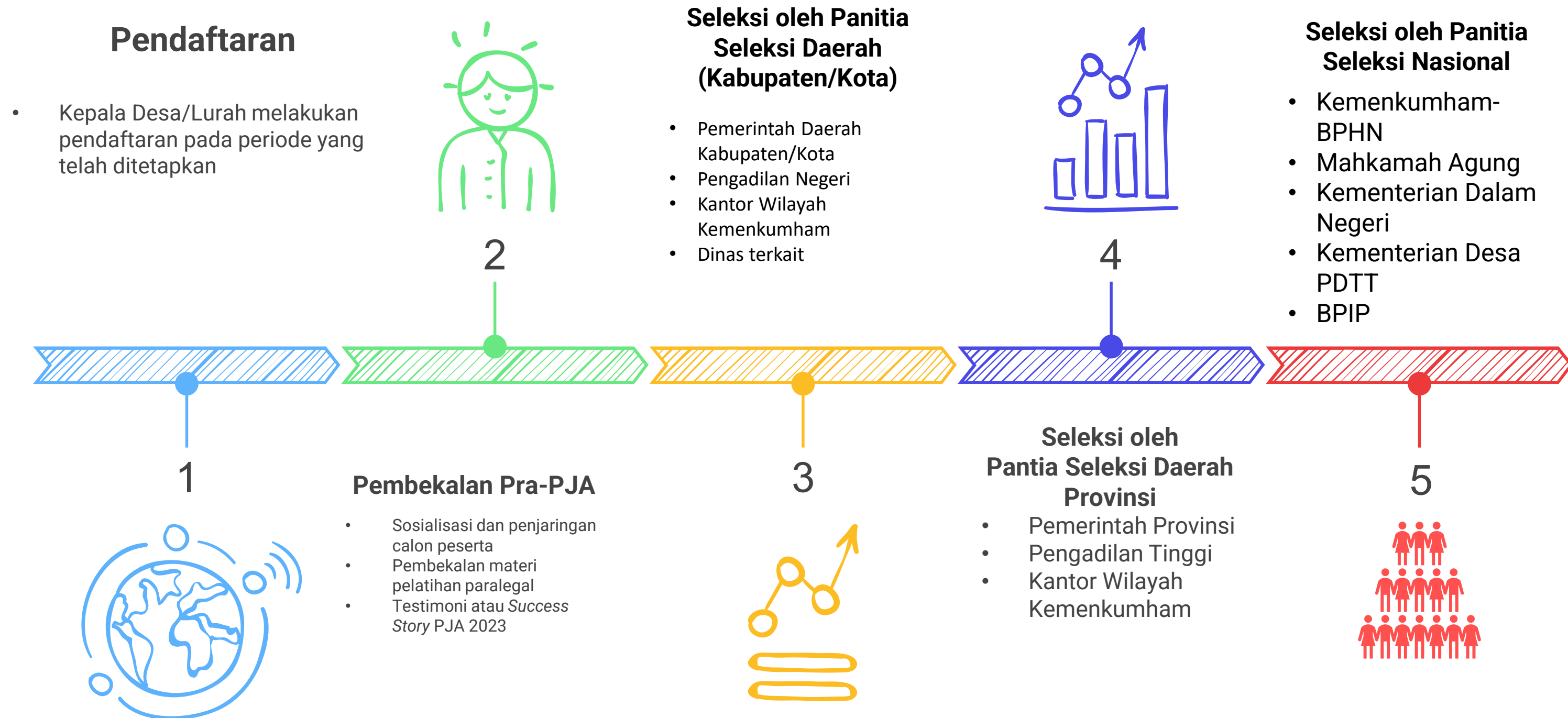
Non Litigation Peacemaker

- Uraian singkat pengalaman penyelesaian sengketa di wilayah disertai bukti penyelesaian misalnya akta perdamaian, berita acara mediasi, foto, dll.
- Dokumentasi berupa video atau foto penyelesaian sengketa hukum di masyarakat
- Pranala (link) berita di media massa dan/atau media sosial terkait penyelesaian sengketa oleh kepala desa/lurah
- Pengalaman dan inovasi bentuk lainnya seperti Peraturan Desa/Kebijakan Lurah mengenai penyelesaian konflik, Peraturan Desa, Desa Adat, Kebijakan Lurah dalam Penyelesaian Sengketa, Sarana dan Prasarana, Sertifikat Pelatihan, Piagam Penghargaan dalam mendukung penyelesaian sengketa di wilayahnya.

Anubhawa Sasana Jagaddhita

- SK Desa/Kelurahan Binaan dan/atau SK Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- Media Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat
- Kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata
- Dokumentasi hasil kerja yang mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata
- Surat Pernyataan tidak terlibat kasus kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), seperti Korupsi, Narkoba, Terorisme dan sebagainya
- Dokumentasi/laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum
- Sertifikat, Piagam, bentuk penghargaan lain, atau Inovasi terkait lapangan kerja, investasi, dan pariwisata

TAHAPAN SELEKSI PARALEGAL JUSTICE AWARD 2024



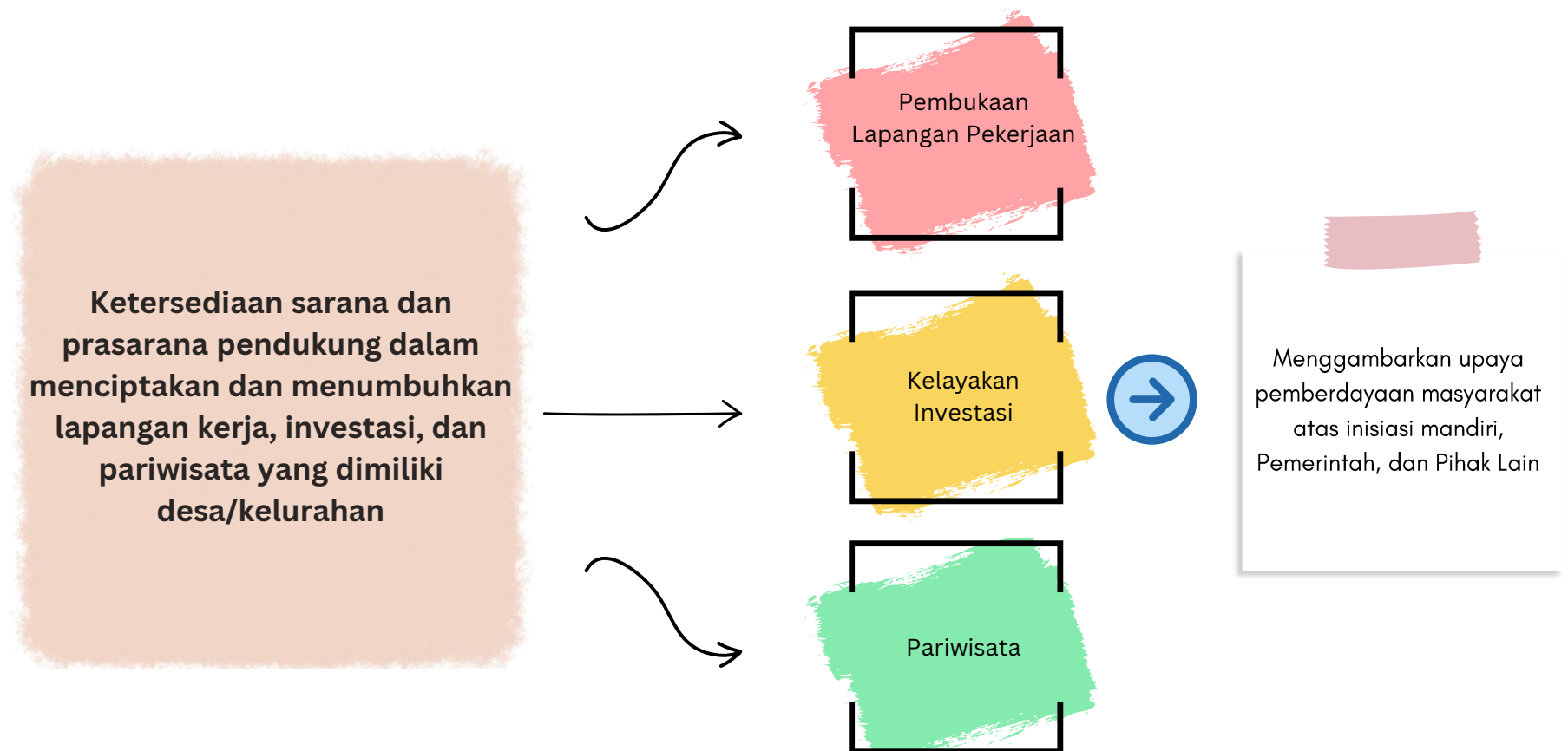
1. Panselda Provinsi adalah panitia seleksi tingkat daerah provinsi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur yang difasilitasi oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
2. Panselda Kabupaten/Kota adalah panitia seleksi tingkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota yang difasilitasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indikator Penilaian pada Seleksi Daerah Kabupaten/Kota

Non Litigation Peacemaker



Anubhawa Sasana Jagaddhita



- Setelah selesai tahapan seleksi daerah kabupaten/kota, Panitia Seleksi Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi kepada Panitia Seleksi Daerah Provinsi
- Pelaksanaan seleksi daerah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi

Indikator Penilaian pada Seleksi Daerah Provinsi Melalui Wawancara

Non Litigation Peacemaker

- 01 Pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa/kelurahan
- 02 Kebijakan yang SIAP (Solutif, Inklusif, Akomodatif, dan Partisipatif);
- 03 Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
- 04 Inovasi dalam penyelesaian sengketa yang telah dilakukan berupa sertifikat, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya

Anubhawa Sasana Jagaddhita

- 01 Kebijakan dan Inovasi yang telah dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat yang mendorong Pembukaan Lapangan Pekerjaan. Investasi, Sektor Pariwisata
- 02 Peran aktif Kelompok Kadarkum dan/atau kelompok masyarakat lain
- 03 efektifitas dan Efisiensi Kegiatan Penyuluhan Hukum

Seleksi Nasional Non Litigation Peacemaker

Kelayakan

- Penilaian Panselda Kabupaten/Kota;
- Penilaian Panselda Provinsi;
- Presensi Paralegal Academy;
- Pre-Test Paralegal Academy;
- Post-Test Paralegal Academy.

Kepatutan

- Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- Kemampuan melakukan penguatan terhadap masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum;
- Kemampuan memahami hukum dasar; dan
- Kemampuan menyelesaikan sengketa di masyarakat.

Seleksi Nasional

Anubhawa Sasana Jagaddhita

Kelayakan

- Penilaian Panselda Kabupaten/Kota;
- Penilaian Panselda Provinsi.

Kepatutan

- Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam menciptakan dan menumbuhkan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata di desa/kelurahan;

Seleksi Nasional

“Scoring dalam penentuan peserta *Paralegal Academy*”

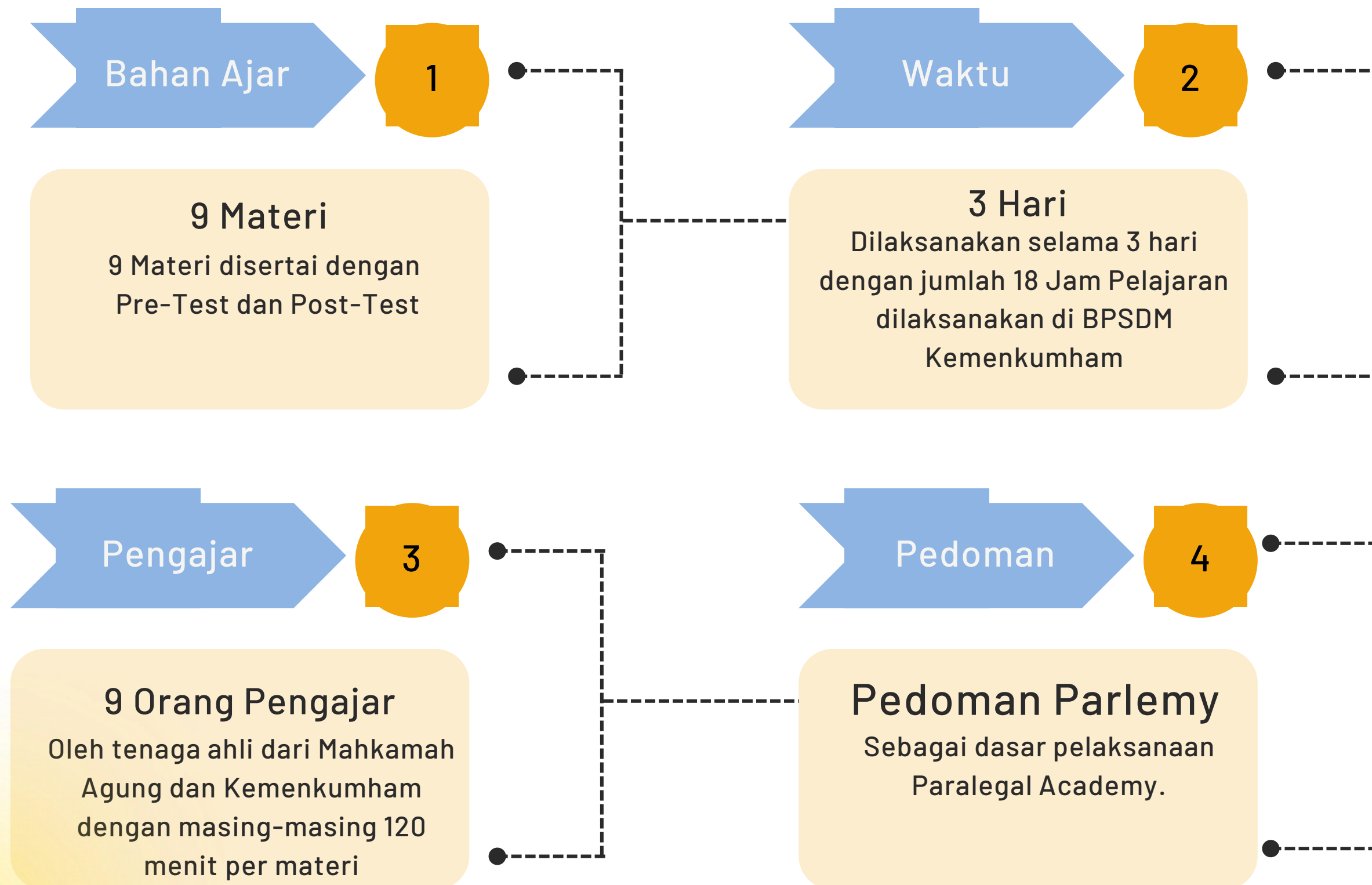
**300 Peserta Dengan
Nilai Terbaik**

**Dilakukan secara
proporsional**

Rangkaian seleksi dan pengumuman akan dilakukan melalui Aplikasi PJA
(pja.bphn.go.id)

PARALEGAL ACADEMY

Diberikan kepada Kepala Desa/Lurah yang telah lulus seleksi Panitia Seleksi dan diselenggarakan di Jakarta



Materi

- Pengantar negara hukum dan pancasila
- Pengantar singkat hukum pidana
- Pengantar singkat hukum perdata
- Pengantar singkat hukum administrasi negara
- Tehnik penyelesaian konflik dan sengketa hukum di masyarakat
- Alternatif penyelesaian konflik/sengketa di luar pengadilan (non-litigasi)
- Metode dan teknik mediasi
- Paralegal dalam bantuan hukum dan advokasi
- Pola relasi penyuluh hukum dalam pembentukan desa sadar hukum

ANGGARAN

APBN



- Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Mahkamah Agung RI
- Kemendagri
- Kemendesa PDTT
- BPIP

APBD



- Perjalanan Dinas Peserta (Kepala Desa dan Lurah) termasuk uang harian peserta.

Kemitraan PJA 2024



KEMENKUMHAM
BPHN dan BPSDM

- BPHN sebagai penyelenggara PJA
- BPSDM sebagai fasilitator tempat pelaksanaan Paralegal Academy



**MAHKAMAH
AGUNG**

- Koordinasi dengan PN dan PT
- Pembagian tugas dan tanggung jawab penganggaran



KEMENDAGRI

- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- Penjaringan Peserta Lurah



**KEMENDESA
PDTT**

- Sosialisasi melalui jaringan Kemendesa
- Penjaringan Peserta Kepala Desa



BPIP

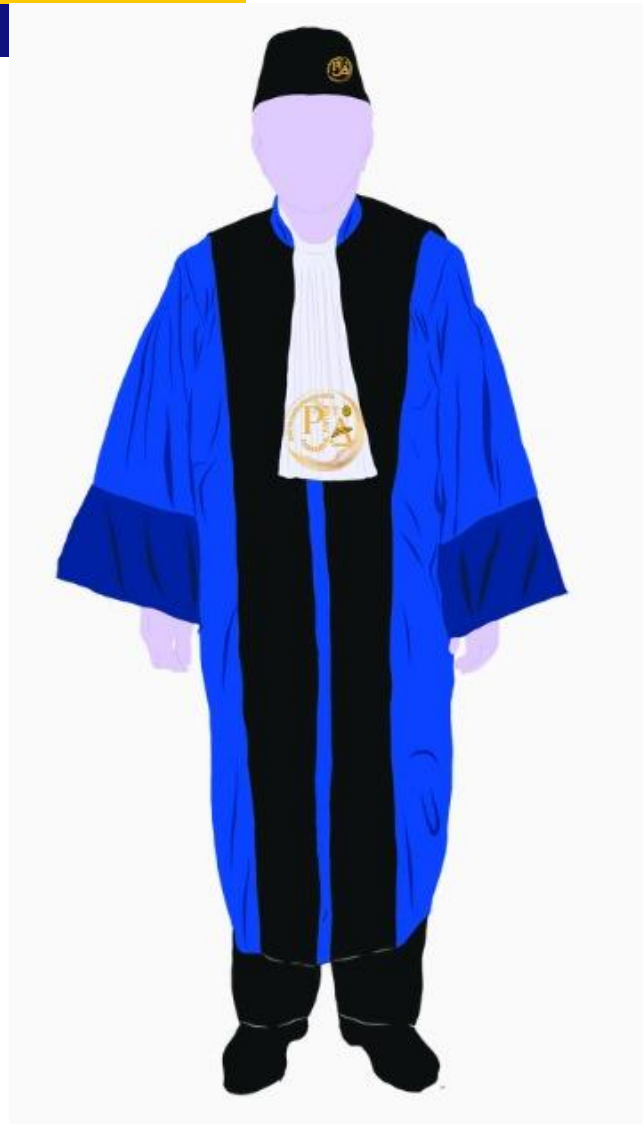
- Pembagian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan Paralegal Academy

Berkolaborasi:

- membentuk Panitia Penyelenggara *Paralegal Justice Award 2024* yang terdiri dari Panselda Kabupaten/Kota, Panselda Provinsi, dan Panitia Seleksi Nasional;
- merencanakan dan membagi peran serta tanggung jawab dalam penganggaran *Paralegal Justice Award 2024*.

Kategori Penghargaan pada *Paralegal Justice Awards*

	CAT 1	TOP 10 Favorit Publik yang dipilih melalui vote pada pja.bphn.go.id yang dimulai bersamaan dengan pelaksanaan seleksi daerah
	CAT 2	TOP 10 Paralegal Justice Award diberikan kepada 10 peserta dengan nilai terbaik
	CAT 3	Anugerah <i>Paralegal Justice Award</i> bagi peserta yang memenangkan <i>Non Litigation Peacemaker</i> dan <i>Anubhawa Sasana Jaggadhita</i>
	CAT 4	Penerima Penghargaan <i>Non Litigation Peacemaker</i> Atau <i>Anubhawa Sasana Jaggadhita</i>



Jubah NLP



PIN *Non Litigation Peacemaker*



Piala bagi Penerima *Paralegal Justice Award*



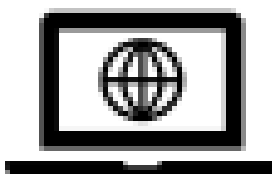
Medali dan Piagam *Anubhawa Sasana Jagaddhita*

Award lainnya:

1. SK Menkumham bagi *Awardee Paralegal Justice Award*;
2. Sertifikat Pelatihan Paralegal;
3. 10 Peserta terbaik gratis Pelatihan Mediasi oleh Lembaga Mediasi Terakreditasi MA; dan
4. Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik dalam pelaksanaan PJA 2024.



Terima kasih.



Info lebih lanjut : pja.bphn.go.id
Contact Person : 082168178530 (Dorma Elvrianty)
082220225605 (Susan Widhiyastuti)



KEPALA DESA/LURAH



Daftar Sekarang!

Paralegal Justice Award 2024

Periode Pendaftaran:
1 November 2023 s.d. 31 Desember 2023

LINK PENDAFTARAN:



pja.bphn.go.id

